

Memonitor kemiskinan di wilayah perhutanan sosial

Ahmad Kusworo¹, Tito Indrawan¹, Joseph Hutabarat¹, Truly Santika², Rachel Friedman², Sugeng Budiharta³, Erik Meijaard⁴, Freya St. John⁵, & Matthew Struebig⁶.

¹Fauna & Flora International, ²University of Queensland, ³Indonesian Institute of Sciences (LIPI), ⁴Borneo Futures, ⁵Bangor University, ⁶Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE) University of Kent.



Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari tahun 2015 hingga 2019, Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan 12,7 juta hektar hutan untuk PS. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta melestarikan keseimbangan lingkungan dan meningkatkan dinamika sosial budaya.

Hutan yang ditetapkan sebagai PS dikelola oleh masyarakat setempat, yang diberikan hak untuk mengembangkan berbagai kegiatan berbasis kehutanan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah disetujui. PS harus menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap lima tahun, sesuai dengan rencana pengelolannya. Akan tetapi, diperlukan suatu mekanisme monitoring berskala besar untuk dapat mengevaluasi apakah program PS secara keseluruhan telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami membandingkan dua pendekatan yang digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan dan kesejahteraan di desa-desa PS dalam rentang waktu tertentu. Kami membandingkan data sensus Potensi Desa (PODES) dari pemerintah, dengan metode berbasis lapangan yang menargetkan rumah tangga-rumah tangga di Kalimantan Barat. Kami mencatat semua kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, dan menjelaskan kondisi yang berhubungan dengan desa-desa di mana program PS telah berhasil.

Rekomendasi utama:

Terdapat beberapa metode yang berbeda-beda untuk memonitor kesejahteraan manusia, yang mencakup berbagai dimensi kemiskinan.

Dalam memonitor skema perhutanan sosial di masing-masing desa, pengukuran berbasis rumah tangga seperti NESP dapat menunjukkan aspek-aspek kemiskinan yang saat ini paling mendesak.

Untuk memonitor perhutanan sosial dalam skala yang lebih besar (misalnya tingkat kabupaten atau provinsi), data PODES nasional juga dapat menyajikan indikator-indikator kemiskinan yang multi-dimensional.

Kedua alat pengukuran ini memberikan kesimpulan yang serupa, dan memungkinkan monitoring tingkat daerah dari waktu ke waktu.

Memonitor perubahan status kemiskinan

Pengukuran Kemiskinan Multi-dimensional menggunakan data Potensi Desa (PODES)

Tingkat kemiskinan umumnya diartikan sebagai proporsi orang yang hidup di bawah standar global USD 1,90 per harinya¹. Akan tetapi, pada kenyataannya kemiskinan mencakup kekurangan dalam banyak hal, misalnya kurangnya pemenuhan kebutuhan mendasar seperti akses pemukiman, layanan kesehatan, atau pendidikan.

Atas dasar ini, terdapat beberapa indikator-indikator alternatif untuk mengukur kemiskinan, yang dapat menggambarkan berbagai kekurangan yang dialami oleh orang-orang berstatus miskin. Indeks Kemiskinan Multi-dimensional digunakan oleh organisasi-organisasi pembangunan internasional² to untuk mengukur dimensi kemiskinan non-moneter. Di Indonesia, indeks tersebut menggunakan informasi seperti data DHS dan PODES³.

Pengumpulan data PODES dilakukan oleh Biro Pusat Statistik setiap 3-5 tahun di desa-desa di seluruh Indonesia. Database PODES tersedia di tingkat satuan administrasi desa, yang dapat digabungkan dengan data spasial batas wilayah untuk memetakan informasi tentang kemiskinan, dan menentukan perubahan dari waktu ke waktu dan atas luas wilayah yang besar.



Keuntungan:

- Data pemerintah digunakan sebagai dasar informasi kebijakan pembangunan.
- Data tersedia secara berkala dan dapat dipersiapkan dengan pengetahuan GIS.
- Tersedia untuk wilayah geografis yang luas (seluruh Indonesia).

Cara menggunakan:

- Sebagai basis informasi dan untuk mengevaluasi implementasi di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional.
- Dapat mengukur perubahan kuantitatif dari waktu ke waktu (ketika indikator yang sama tersedia).

Yang perlu dipertimbangkan:

- Data dikumpulkan di tingkat desa, sehingga tidak menampilkan variasi tingkat kemiskinan di tingkat rumah tangga atau dusun.
- Pengukuran aset ekonomi atau keuangan tidak maksimal.
- Karena perubahan batas wilayah di Indonesia, perbandingan dari waktu ke waktu sulit dilakukan.



Indikator-indikator yang digunakan dalam pendataan Potensi Desa oleh pemerintah untuk mengkarakterisasi lima dimensi kemiskinan di desa-desa di Kalimantan Barat. Indikator tambahan dari PODES juga dapat digunakan, yang bergantung dari tujuan studi.

1. <https://data.worldbank.org/topic/poverty>

2. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

3. Alkire, S., & Santos, M.E. (2013) A multidimensional approach: poverty measurement & beyond. *Social Indicators Research*, 112, 239-257.

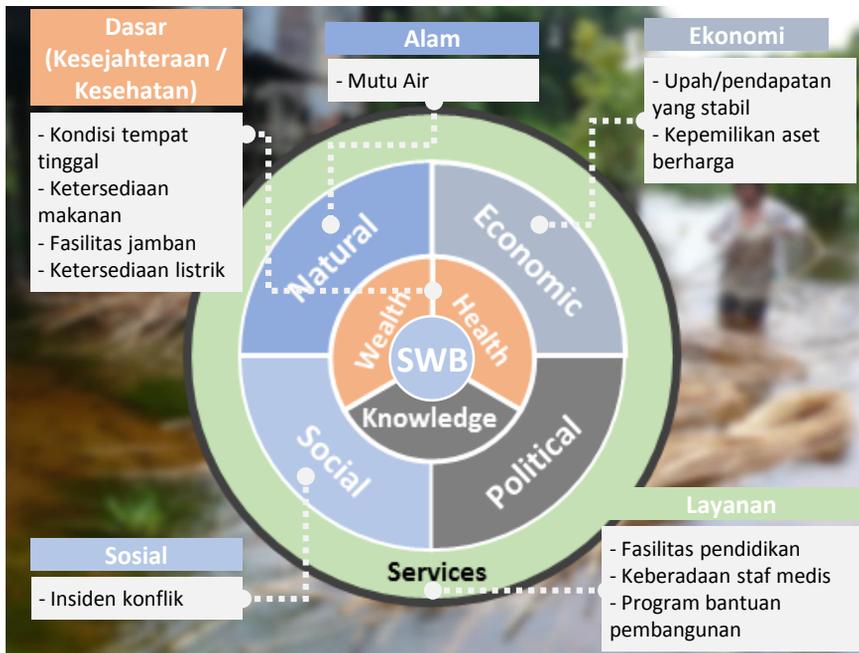
Memonitor perubahan status kemiskinan

Nested Spheres of Poverty (NESP)

NESP adalah sebuah metode untuk menilai kemiskinan dan kesejahteraan di tingkat rumah tangga yang dikembangkan untuk Indonesia oleh CIFOR pada tahun 2006⁴. Pendekatan NESP menetapkan tiga kondisi utama untuk dimonitor:

1. Kesejahteraan subjektif (SWB)
2. Kesejahteraan inti, yang meliputi penilaian kesehatan, harta benda, dan pengetahuan
3. Lingkungan yang mendukung, yang meliputi penilaian kondisi lingkungan alam, serta keadaan sosial dan ekonomi.

Bersama-sama, ketiga komponen tersebut mencakup kebutuhan dasar manusia, aset dan kapabilitas individu, serta keadaan yang mendorong orang-orang untuk lepas dari kemiskinan.



Kerangka konsep metode NESP yang menunjukkan komponen kesejahteraan subjektif yang berbeda-beda, dan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di desa-desa di Kalimantan Barat.

CIFOR menguji metode ini di Kalimantan Timur pada tahun 2006, yang kemudian dilakukan di Kalimantan Barat pada tahun 2012. NESP melibatkan kuesioner di tingkat rumah tangga, dan selanjutnya digabungkan untuk memberi informasi tentang desa. Jumlah rumah tangga yang disurvei harus mencukupi untuk memastikan bahwa data dapat mewakili suatu desa – sekitar 33-35% rumah tangga dalam satu desa. Akan tetapi, jika terdapat <20 rumah tangga dalam satu desa, maka keseluruhan rumah tangga dalam desa tersebut harus disurvei⁵. Banyak pertanyaan dalam survei yang serupa dengan survei PODES, tetapi tidak semuanya demikian.

Pada tahun 2017, kami mengulangi survei NESP 2012 yang dilakukan di tujuh desa di Kalimantan Barat, agar kami dapat menyelidiki perubahan kemiskinan multi-dimensional dari waktu ke waktu. Untuk dapat membandingkan kemiskinan yang diukur oleh data PODES dengan pengukuran menggunakan NESP, kami mengumpulkan indikator-indikator serupa dari kedua alat pengukuran tersebut ke dalam lima dimensi: dasar, alam, sosial, ekonomi, dan layanan.

Keuntungan:

- Memberikan informasi di tingkat rumah tangga, alih-alih di tingkat desa.
- Meliputi pengukuran kesejahteraan subjektif, di samping pengukuran kemiskinan non-moneter lainnya.

Cara menggunakan:

- Sebagai basis informasi dan mengevaluasi implementasi di tingkat desa.
- Untuk mengidentifikasi aspek-aspek kemiskinan yang mana saja yang menjadi sumber masalah di desa-desa.

Yang perlu dipertimbangkan:

- Metode ini memerlukan ukuran sampel yang memadai (minimal 20 rumah tangga atau 33-35% rumah tangga di setiap desa).
- Pengumpulan data memerlukan waktu yang banyak dan terkadang sangat mahal untuk wilayah luas.



4. Gönner, C., Haug, M., Cahyat, A., Wollenberg, E., deJong, W., Limberg, G., Cronkleton, P., Moeliono, M., Becker, M. 2007. Capturing nested spheres of poverty: a model for multidimensional poverty analysis and monitoring. CIFOR Occasional Paper; no. 46. 24p

5. Cahyat A, Gonner C, Haug M. 2007. Assessing household poverty and wellbeing. A manual with examples from Kutai Barat, Indonesia.

Status dan perubahan kemiskinan di Kalimantan Barat

Di sini, kami membandingkan hasil dari survei NESP dengan PODES untuk menilai status dan perubahan kemiskinan di desa-desa di Kalimantan Barat. Data NESP tersedia untuk 7 desa pada tahun 2012 dan 10 desa pada tahun 2017. Enam desa menerima status hutan desa hingga tahun 2017.

Indikator-indikator ini sebagian besar identik, namun berbeda untuk kesejahteraan *ekonomi*. Dengan demikian, kita harus tetap berhati-hati ketika menginterpretasi dimensi kemiskinan ekonomi.

Kami membandingkan: (i) status kemiskinan saat ini di masing-masing desa yang diukur dengan dua metode berbeda, yaitu PODES dan NESP.

(ii) Perubahan status kemiskinan yang dideteksi oleh kedua metode tersebut.



(i) Status kemiskinan

Metode PODES dan NESP mengungkap pola yang serupa untuk dimensi kesejahteraan dasar, infrastruktur (layanan), sosial, dan lingkungan. Kedua metode menggunakan indikator-indikator yang berbeda untuk kesejahteraan ekonomi, sehingga hasil perbandingannya tidak konsisten. Tingkat kesesuaian adalah 73% tanpa memasukkan indikator ekonomi.

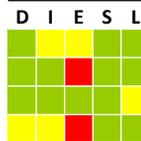
Semua desa di Kapuas Hulu, termasuk desa-desa yang memiliki status hutan desa (HD), relatif lebih sejahtera di semua aspek kesejahteraan, kecuali untuk aspek ekonomi. Desa-desa HD di Ketapang secara khusus memiliki tingkat kesejahteraan lingkungan dan ekonomi yang rendah berdasarkan beberapa indikator.

Warna-warna yang berbeda mencerminkan status gabungan dari indikator untuk masing-masing komponen kemiskinan, dan relatif terhadap seluruh desa dalam cakupan studi. Merah menunjukkan tingkat rendah, dan hijau menunjukkan tingkat kesejahteraan tinggi. Kuning menunjukkan tingkat moderat. Hanya 1 indikator yang tersedia untuk mengukur dimensi kesejahteraan lingkungan (mutu air) dan sosial (konflik).

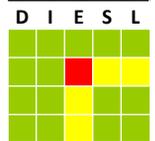
Kab. Kapuas Hulu

HD Menua Sadap
HD Nanga Lauk
Riam Panjang
Tamao

PODES (2015)

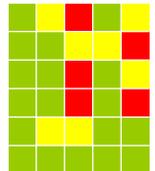


NESP (2017)



Kab. Ketapang

HD Laman Satong
HD Pematang Gadung
HD Sungai Besar
HD Sungai Pelang
Paoh Concong
Suka Damai



(ii) Perubahan tingkat kemiskinan

Status kemiskinan di desa-desa di Kapuas Hulu tidak banyak berubah sejak HD diimplementasikan. Sebagian besar desa yang disurvei di Ketapang, termasuk desa-desa dengan status HD, mengalami penurunan tingkat kesejahteraan lingkungan dan ekonomi menurut PODES. Kesejahteraan ekonomi meningkat di 2 desa, tetapi memburuk di 3 desa lainnya.

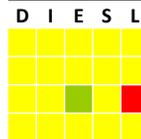
Akan tetapi, kemungkinan perlu waktu lebih dari 5 tahun antara waktu survei untuk dapat menunjukkan peningkatan kesejahteraan.

Warna-warna yang berbeda mencerminkan arah perubahan tingkat kesejahteraan untuk masing-masing komponen kemiskinan dan relatif terhadap semua desa dalam cakupan studi. Merah menunjukkan penurunan kesejahteraan, dan hijau menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Kuning menunjukkan tidak ada perubahan. Informasi tentang mutu air tidak tersedia untuk mengukur kesejahteraan *Lingkungan* dalam survei NESP 2012.

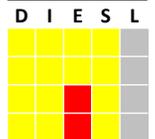
Kab. Kapuas Hulu

HD Menua Sadap
HD Nanga Lauk
Riam Panjang
Tamao

PODES

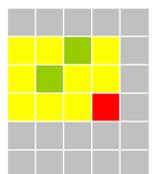
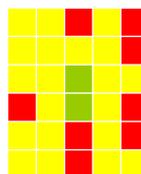


NESP



Kab. Ketapang

HD Laman Satong
HD Pematang Gadung
HD Sungai Besar
HD Sungai Pelang
Paoh Concong
Suka Damai



Bagaimana kami menghasilkan indikator *traffic light* ini...

Perkiraan status kemiskinan saat ini dalam data PODES (2014) dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor persentil dari indikator-indikator terkait, yaitu merah = buruk = persentil 0-33, kuning = moderat = 33-67, hijau = baik = 67-100. Untuk metodologi NESP, skala skor disesuaikan menjadi persentase dan ambang batas yang sama juga diterapkan (bergantung pada format indikator – lihat metodologi CIFOR). Indikator untuk perubahan kemiskinan dihitung dari arah perubahan status kemiskinan dari survei pertama ke survei kedua (misalnya, hijau menandakan perbaikan status; merah berarti penurunan). Tingkat kesesuaian didapatkan dari persentase indikator yang menghasilkan status yang sama pada masing-masing metode. Patut dicatat bahwa kedua metode ini sangat jarang menghasilkan status yang berbeda (ketika indikator menunjukkan hasil buruk pada satu metode, tetapi hasil baik di metode lainnya).

Mengapa peningkatan kesejahteraan lebih baik di beberapa desa perhutanan sosial tertentu dibandingkan dengan desa-desa PS lainnya?

Berbagai studi yang telah dilakukan di desa-desa di Kalimantan Barat memberikan kita wawasan awal mengenai keberhasilan skema perhutanan sosial. Konteks lokal, termasuk jenis hutan, dan bentuk dukungan kepada masyarakat, merupakan faktor kunci. Penting untuk dicatat bahwa diperlukan waktu untuk dapat merasakan manfaat perhutanan sosial, tetapi kita dapat mengambil pelajaran dari skema yang ada saat ini untuk melakukan perbaikan di tempat lainnya.

Kisah keberhasilan perhutanan sosial...

Skema PS yang paling berhasil di Kalimantan biasanya merupakan wilayah hutan yang terletak di atas lahan mineral, dengan keterlibatan masyarakat yang besar. Misalnya di Kab. Ketapang, masyarakat di Laman Sotong sangat bergantung pada lahan HD seluas 1070 ha untuk pasokan air dan hasil-hasil hutan non-kayu. Masyarakat setempat berjuang keras untuk mencegah lahan tersebut dikonversi menjadi lahan sawit. Di samping itu, pendanaan dari NGO melalui REDD+ memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan rutin dan monitoring, yang memberi insentif lebih lanjut (meskipun kecil) untuk melindungi hutan.

Di Kab. Kapuas Hulu, HD Menua Sadap mencakup 1.395 ha lahan Hutan Produksi Terbatas, yang terbentang antara Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun. Tidak banyak yang menggunakan lahan untuk pertanian karena medannya yang curam. Masyarakat menggunakan lahan hutan sebagian besar untuk hasil hutan non-kayu, perikanan, dan berburu, yang diizinkan selama ekosistem tetap stabil. Dengan hutan-hutan yang mengelilingi HD, ancaman terhadap ekosistem cukup rendah.



Pelajaran yang dapat diambil:

- Keberhasilan awal sebagian dipicu oleh sejarah panjang penggunaan lahan hutan oleh masyarakat, dan fasilitasi oleh NGO.
- HD yang dikelilingi oleh wilayah hutan pada dasarnya memiliki tingkat ancaman rendah karena lokasinya.
- Di wilayah pertanian, HD dapat berhasil jika terdapat insentif yang memadai (misalnya REDD+) untuk melindungi hutan.



Pelajaran yang dapat diambil:

- Kondisi eksternal, seperti hilangnya air karena pembuatan saluran, memicu kebakaran di lahan gambut, dan membuat wilayah HD yang terdegradasi sulit untuk dikelola.
- HD bisa efektif memperlambat laju deforestasi apabila bantuan diberikan untuk pengelolaan air.
- Prospek akan membaik apabila ada tanggung jawab yurisdiksi resmi untuk pengelolaan lahan gambut.

Tantangan perhutanan sosial...

Skema PS di lahan gambut umumnya lebih sulit, tetapi bukan tidak mungkin, untuk dikelola. Misalnya HD Sungai Pelang, yang mencakup 411 ha lahan gambut Pematang Gambut di Kab. Ketapang, dan terdiri dari hutan gambut, semak belukar, dan lahan basah terbuka. Wilayah tersebut dikelilingi oleh perkebunan sawit, tambang bauksit, dan pertanian skala kecil, dan adanya saluran/kanal yang dibuat untuk kepentingan pembangunan jalan telah menurunkan tabel air. Wilayah ini mengalami degradasi parah oleh kebakaran dan sebagian besar hutan asli telah terbakar. Masyarakat setempat mengajukan status HD untuk menanggulangi ancaman dan mendanai penutupan saluran air, membasahi kembali lahan gambut, dan menerapkan *free fire agriculture*.

Di Nanga Lauk di Kab. Kapuas Hulu, wilayah HD mencakup 1430 ha lahan gambut yang terletak dalam areal hutan produksi yang besar. Di sana, masyarakat bergantung pada hutan ini untuk mengambil madu dan kegiatan perikanan. Terdapat kekhawatiran mengenai aktivitas *overfishing*, perambahan, dan kebakaran, tetapi ancaman tersebut masih relatif rendah.

MEPS *Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial*

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
<https://research.kent.ac.uk/meps/>

Didanai oleh:



Bekerja sama dengan lembaga-lembaga:

